

**PENGARUH LEVERAGE, UKURAN LEGISLATIF, INTERGOVERNMENTAL REVENUE DAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH****Mirna Sesotyaningtyas** ✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima Juni 2012

Disetujui Juli 2012

Dipublikasikan Agustus 2012

*Keywords:***intergovernmental revenue; legislative; leverage; local government's financial performance; regional tax revenue****Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengujian secara simultan menunjukkan variabel-variabel independen, leverage, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan pendapatan pajak daerah, secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Sedangkan secara parsial, variabel *leverage*, ukuran legislatif dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Sedangkan variabel pendapatan pajak daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Abstract

*The purpose of this study are to get empirical evidence influence of leverage, legislative size, intergovernmental revenue and tax revenue toward local government's financial performance. The result in this research showed simultaneously testing indicated independent variables, leverage, legislative, intergovernmental revenue, and regional tax revenue, jointly had an influence on regional financial performance based on the performance efficiency. Partially, leverage variable, legislative and intergovernmental revenue had no influence on regional financial performance based on the performance efficiency ratio. While variable of regional tax revenue had a negative influence on regional financial performance based on the performance efficiency ratio.*

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FE Unnes Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: akuntansi.unnes@gmail.com

ISSN 2252-6765

## Pendahuluan

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di provinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama (Sardjito, 2000). Masyarakat terus berkembang dengan segenap tuntutan demikiam juga pemerintah daerah. Hal ini berimplikasi pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Kompleksitas layanan yang semakin tinggi membawa pada suatu implikasi lanjutan terhadap tuntutan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dapat diartikan seperti hubungan antara *stakeholder* dan manajer. Dimana pihak *stakeholder* memberikan wewenang kepada manajer untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus pandai dalam menyelenggarakan pemerintahannya sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik serta adanya evaluasi berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu (Sumarjo, 2010).

Mengingat adanya tuntutan dari masyarakat atas laporan pertanggungjawaban yang transparan, laporan keuangan pada lembaga pemerintahan daerah dianggap masih memiliki banyak keterbatasan penyajian yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga perusahaan yang bersifat komersial. Keraguan masyarakat ini dapat diatasi dengan adanya pengukuran kinerja. Kinerja disebut juga sebagai *performance* yang artinya adalah pencapaian suatu target (keberhasilan) dari sesuatu yang direncanakan dalam organisasi (Sumarjo, 2010). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih rendah jika dilihat dari sisi rasio efektivitasnya. Sedangkan dalam penelitiannya, Sumarjo (2010) mengatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih kurang efisien jika dilihat dari sisi rasio efisiensinya.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah (Pemda) sangat berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba

(*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun dalam laporan realisasi anggaran (LRA). Jika anggaran/realisasi pendapatan lebih besar daripada anggaran/realisasi belanja, maka terjadi surplus, kalau sebaliknya maka terjadi defisit. Terdapat pemerintah daerah yang mengalami surplus dalam anggaran ataupun realisasi anggarannya, namun lebih banyak pemerintah daerah yang mengalami defisit. Namun, bukan berarti lebih sedikit pemerintah daerah yang kondisi keuangannya baik dibanding yang buruk, karena surplus/defisit bukanlah kunci utama baik buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor utama antara lain, penerimaan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, sumber daya manusia dan kondisi makro ekonomi suatu daerah.

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Dengan adanya pengukuran, analisis, dan evaluasi terhadap data yang berkaitan dengan kinerja, pemerintah dapat segera menentukan berbagai cara untuk mempertahankan atau meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan dan sekaligus memberikan suatu informasi obyektif kepada publik mengenai pencapaian hasil yang diperoleh (Sardjito, 2000).

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut :

- $H_1$  : Leverage, ukuran legislatif, dan intergovernmental revenue berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa.
- $H_2$  : Leverage berpengaruh secara positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

- $H_3$  : Ukuran legislatif berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
- $H_4$  : Intergovernmental revenue berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi kinerja.
- $H_5$  : Pendapatan pajak daerah berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

## Metode

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini adalah data dari keuangan dan non keuangan. Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan daerah berupa neraca dan realisasi APBD. Sedangkan data non keuangan, berupa ukuran legislatif didapat dari data anggota DPRD per Kabupaten/Kota melalui website resmi. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Pulau Jawa. Total populasi adalah 118 kabupaten/kota di bawah 6 provinsi. Sedangkan sampel yang terpilih adalah sebanyak 31 Kabupaten/Kota.

## Definisi Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *leverage*, *intergovernmental revenue*, ukuran anggota legislative dan pendapatan pajak daerah.

### 1. Kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Dalam variabel ini, peneliti menggunakan rasio efisiensi untuk menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio efisiensi maka semakin buruk kinerja. Sedangkan semakin rendah rasio efisiensi menunjukkan kinerja yang baik. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rumus:

### 2. Leverage

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan *debt to equity* dalam mengukur *leverage*. Semakin tinggi nilai *leverage* maka semakin buruk kinerja. Sedangkan semakin rendah *leverage* maka semakin baik kinerja.

### 3. Ukuran Legislatif

Pengawasan atas jalannya pemerintahan dilakukan oleh DPRD. Penelitian yang dilakukan oleh Afiah (2008) menggunakan jumlah anggota legislatif untuk menilai pengaruh terhadap sistem informasi akuntansi pemerintah daerah. Beranjak dari penelitian terdahulu yang dilakukan Afiah (2008), maka peneliti menggunakan jumlah anggota DPRD dalam mengukur ukuran legislatif.

### 4. Intergovernmental Revenue

*Intergovernmental revenue* biasa dikenal dengan dana perimbangan (Sumarjo, 2010). Dalam penelitian ini *intergovernmental revenue* dihitung dengan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan.

### 5. Pendapatan pajak daerah

Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan untuk diberikan lagi kepada masyarakat. Pendapatan pajak daerah dalam penelitian ini diukur dari laporan Realisasi APBD masing-masing pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Florida (2008), menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Uji Normalitas

Tabel hasil pengujian normalitas uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan IBM SPSS Statistics 19 dapat dilihat pada Tabel . Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa variabel dependen (Y) mempunyai nilai signifikan  $0,514 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan residual berdistribusi normal.

### Hasil Uji-F

Hasil Uji-F pada Tabel 2 untuk menguji pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 3,244 dengan nilai signifikansi 0,028. Tingkat signifikansi pada Tabel 2 adalah sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa diterimanya  $H_1$  atau *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 1 Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04725022
	Absolute	,147
Most Extreme Differences	Positive	,105
	Negative	-,147
Kolmogorov-Smirnov Z		,819
Asymp. Sig. (2-tailed)		,514

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data sekunder yang diolah, 2012

**Tabel 2 Uji statistik F**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,033	4	,008	3,244	,028 <sup>a</sup>
	Residual	,067	26	,003		
	Total	,100	30			

a. Predictors: (Constant), Tax, Leverage, Legislatif, Intergovern

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Data yang diolah, 2012

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Hasil koefisien determinasi *Adjusted R Square (Adj R<sup>2</sup>)* diperoleh dari nilai sebesar 0,230 atau kemampuan *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, dan pendapatan pajak daerah untuk menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 23%. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain sebesar 77%.

**Hasil Uji Statistik t**

Uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan Uji-t digunakan untuk melihat pengaruh secara satu-persatu atau secara parsial. Hasil pengujian parsial dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil uji-t untuk H<sub>2</sub> diperoleh angka 0,108 dengan nilai signifikansi sebesar 0,915. Nilai signifikan untuk variabel *leverage* menunjukkan angka diatas tingkat signifikan 0,05 yang menyimpulkan bahwa ditolaknya H<sub>2</sub> atau tidak adanya pengaruh positif *leverage* terhadap kinerja keuan-

gan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Hasil uji-t untuk H<sub>3</sub> diperoleh angka -1,108 dengan nilai signifikansi sebesar 0,278. Nilai signifikan untuk variabel legislatif menunjukkan angka diatas tingkat signifikan 0,05 yang menyimpulkan bahwa ditolaknya H<sub>3</sub> atau tidak adanya pengaruh negative ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Hasil uji-t untuk H<sub>4</sub> diperoleh angka 2,016 dengan nilai signifikansi sebesar 0,054. Nilai signifikan untuk variabel *intergovernmental revenue* menunjukkan angka diatas tingkat signifikan 0,05 yang menyimpulkan bahwa ditolaknya H<sub>4</sub> atau tidak adanya pengaruh negatif *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

Hasil uji-t untuk H<sub>5</sub> diperoleh angka 2,883 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Hal ini menyimpulkan bahwa ditolaknya H<sub>5</sub>, dikarenakan pada perhitungan statistik, nilai F hitung

**Tabel 3 Koefisien determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,577 <sup>a</sup>	,333	,230	,05075488	1,613

a. Predictors: (Constant), Tax, Leverage, Legislatif, Intergovern

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber: data yang diolah, 2012

**Tabel 4 Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,654	,209		3,136	,004
	Leverage	,192	1,783	,018	,108	,915
	Legislatif	-,002	,001	-,199	-1,108	,278
	Intergovern	,503	,249	,582	2,016	,054
	Tax	5,792E-13	,000	,839	2,883	,008

a. Dependent Variable: Kinerja

Sumber : Data yang diolah, 2012

pada variabel pendapatan pajak daerah bernilai positif, atau berkebalikan dengan hipotesis. Namun nilai signifikan untuk variabel pendapatan pajak daerah menunjukkan angka dibawah tingkat signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh positif signifikan pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue* dan pendapatan pajak daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa. Hal ini dikarenakan kabupaten/kota di Jawa memiliki dana internal yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau hutang dari pihak eksternal. Ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/

kota di Jawa. Hal ini dikarenakan bukan kuantitas atau besarnya jumlah anggota legislatif yang menjamin meningkatnya kinerja keuangan, namun yang terpenting adalah kualitas dari pengawasan pihak legislatif itu sendiri terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/kota di Jawa. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten/kota belum dapat menggunakan dana dari pemerintah pusat dengan baik. Terlihat dari besarnya jumlah belanja pegawai tidak sebanding dengan belanja pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten/kota. Pendapatan pajak daerah tidak berpengaruh secara negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa berdasarkan rasio efisiensi kinerja. Namun, berdasarkan perhitungan statistik, pendapatan pajak daerah menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Tuntutan dari masyarakat akan akuntabilitas penggunaan pajak da-

erah menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### Daftar Pustaka

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah*. Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XI Padang.
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. *Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan System Informasi Akuntansi*. Working Paper In Accounting And Finance Padjajaran University.
- Florida, Asha. 2008. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: BPUNDIP
- \_\_\_\_\_. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19.00*. Semarang: BPUNDIP.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah RI No.105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*.
- Sadjiarto, Arja. 2000. *Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.2 No.2 : 138-150.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerntah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Halachmi,Arie. 2005. *Performance Measurement is Only One Way of managing Performance*. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol.54: 502-516